



BOOK CHAPTERS

**Green Mindset Towards
Sustainable Development**

BUKU PERTAMA

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH DESA

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



BOOK CHAPTERS

Green Mindset Towards Sustainable Development

BUKU PERTAMA

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH DESA

**Luaran Studi Komparatif dan Seminar Bersama
Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan
Pascasarjana Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali**

**Universitas Mahasaraswati Denpasar
4 Januari 2020**



Green Mindset Towards Sustainable Development
Buku Pertama: Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Wilayah Desa
Book Chapters

Editor

Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.
Dr. Ir. I Ketut Sumantra, M.P.

Editor Bahasa & Perwajahan Buku

Ida Bagus Arya Lawa Manuaba, M.Pd.
Dewa Krisna Prasada, M.H.

Desain cover & tata letak isi | Kadek Haricatra Sanjiwani, Weda Wigena
Versi digital | Nindy Widiastuti

15 X 23 cm

Cetakan Pertama: April 2020

ISBN: 978-623-XXXX-XX-X

Hak cipta ©2020 pada penulis

Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



UNMAS DENPASAR

Diterbitkan oleh

UNMAS PRESS

Jl. Kamboja no. 11A
Denpasar, Bali 80233
Telp: (0361) 227019

DAFTAR PENULIS

BUKU PERTAMA

Integrasi Sektor Pertanian dan Pariwisata Bali Melalui Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat

I Ketut Sumantra

Keberlanjutan Pengembangan Kawasan Agropolitan Belajen di Kabupaten Enrekang

Haeruddin Saleh

Pembangunan Masyarakat Desa Berbasis Kearifan Lokal di Desa Matajang Kabupaten Enrekang

Syamsul Bahri dan Harifuddin Halim

Pengakuan Masyarakat (Hukum) Adat (Perspektif Otonomi Daerah)

Baso Madiang

Pengembangan Produk Unggulan Rajungan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

Hasanuddin Remmang

Model Profesionalisme Pengajar pada Era Masyarakat Digital 4.0

I Nengah Sudja dan Ni Kadek Suryani

***jineng*: Konsep Ketahanan Pangan Keluarga Berbasis Kearifan Lokal**

Ni Gusti Agung Gde Eka Martiningsih, Luh Putu Kirana Pratiwi, Dewa Ayu Evi Wahyuni,
I Ketut Sumantra, I Putu Sujana

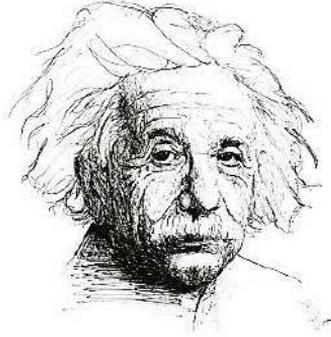
Potential Flood Disaster Risk in Urban Palangga, Gowa Regency (Sustainable Development Perspective)

Syafri dan Arni Putri Awaliyah U.

Identifikasi Potensi Sumber Daya Desa dalam Pengembangan Desa Wisata

I Ketut Widnyana, Ni Putu Pandawani, I Putu Karunia





“ The measure of intelligence is
the ability to **change**.”

—Albert Einstein

PENGANTAR EDITOR I

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

Setelah membaca buku ini dan menyimak substansi materi yang disampaikan, saya menyimpulkan bahwa buku ini dapat memberi pemahaman kepada pembaca bahwa isu global pembangunan saat ini berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan multi-aspek untuk menangani berbagai masalah yang berkembang. Gagasan dan substansi pemikiran pembangunan berkelanjutan yang digagas dan dikaji dalam buku ini beserta contoh-contoh kasus yang disajikan pada dasarnya memberikan gambaran secara nyata tentang fenomena yang berkembang di Indonesia. Dengan demikian, cakupannya akan meliputi beberapa aspek yang terkait secara langsung dengan dinamika pembangunan saat ini. Secara substansi buku ini mengetahakan berbagai pemikiran penulis untuk berbagai perspektif pembangunan yaitu fisik spasial, ekonomi, sosiokultural, dan lingkungan.

Buku ini berisikan artikel ilmiah dosen Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar dan Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah dipresentasikan pada seminar nasional dengan tema “*Green Mindset Towards Sustainable Development*” yang diselenggarakan atas kerjasama Program Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang merupakan kerjasama awal dan semoga terus berlanjut di masa depan.

Secara spesifik buku ini menggagas pemikiran baru bahwa dinamika pembangunan akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan tidak linier sebagai satu siklus perubahan,

akan tetapi cukup kompleks dan tentu sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Faktanya, buku ini tidak hanya menyajikan pikiran-pikiran secara teoritis terhadap fenomena yang berkembang saat ini di Indonesia, akan tetapi gagasan yang ingin disampaikan dalam buku ini juga mengungkapkan berbagai solusi dalam menangani pembangunan untuk skala wilayah, ekonomi, sosiokultural dan lingkungan yang orientasi penyelesaian masalah pembangunan ke depan memerlukan pemikiran yang holistik, komprehensif, dan terpadu ke arah pembangunan berkelanjutan.

Buku ini juga menjawab berbagai isu dan tantangan yang di dalamnya telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan pembangunan. Prinsip pembangunan itu sendiri harus bisa diterjemahkan dan implementasikan untuk berbagai perspektif pembangunan yang lebih luas. Pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi semata biasanya akan menghadapi masalah yang cukup serius dari sisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakatnya. Artinya, dimensi dan aspek pembangunan berkelanjutan harus secara serentak digunakan dalam berbagai tindakan pembangunan baik dari sisi pengambilan keputusan maupun pada tingkat aktor pelaksana pembangunan itu sendiri, dengan harapan bahwa pembangunan adalah sebuah sistem yang saling terkait antara satu aspek dengan aspek lainnya. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan pemerintah sebagai pengambil keputusan dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan ke depan.

Kami pun menyadari jika di dalam penyusunan buku ini terdapat kekurangan, namun kami meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan manfaat bagi pembaca. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia seminar nasional dan seluruh sivitas akademika Program Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah bekerja keras untuk menerbitkan artikel karya ilmiah ini dalam bentuk bab-bab buku (*book chapters*). Terima kasih

juga kami sampaikan tak terkecuali kepada penerbit atas kesediaannya menerbitkan buku ini.

Akhirnya, semoga semua pihak yang telah berpartisipasi mulai penyusunan sampai terbitnya buku ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Direktur Pascasarjana
Universitas Bosowa Makassar

Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.
NIDN 09 1301 740



“Anda yang memutuskan:
jadi penumpang atau pengemudi.”

—Rhenald Kasali
ekonom dan penulis

PENGANTAR EDITOR II

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Kebijakan pembangunan konvensional yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi dalam mekanisme pasar sebagai sasaran keberhasilan pembangunan sudah mulai ditinggalkan. Kebijakan pembangunan harus berpikir secara menyeluruh dan memuat tiga dimensi pembangunan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan, yang mampu menjawab tantangan kehidupan di masa depan sehingga berpihak kepada peningkatan kualitas hidup dan kelestarian lingkungan.

Buku tentang pengelolaan dan pengembangan potensi wilayah desa dan buku pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan ini telah merangkum semua aspek pertimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan secara prinsip dan mendasar yang merupakan buah pikiran dari para dosen Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar dan para dosen Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar. Artikel yang dimuat dalam buku ini telah dipresentasikan pada seminar nasional dengan tema “*Green Mindset Towards Sustainable Development*”. Buku ini merupakan realisasi awal dari kerjasama Program Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar dan diharapkan mampu menghasilkan output kegiatan lain di masa yang akan datang.

Isi buku ini amat penting untuk dipahami karena secara disadari upaya pembangunan bukanlah hanya mengejar kepuasan ekonomi semata, tetapi pembangunan juga harus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

secara berkelanjutan. Dilihat dari sudut pemahaman mengenai prinsip dasar kebijakan pembangunan berkelanjutan maupun dari sudut tanggung jawab sosial dan lingkungan, buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang tepat dalam menghadapi kondisi krisis sosial ekonomi dan bencana lingkungan yang kerap kita hadapi.

Dimensi ruang dalam pembangunan berkelanjutan sudah menjadi ulasan dalam buku ini demikian juga dengan pemetaan keanekaragaman biokultur dalam revitalisasi Warisan Dunia juga telah diulas secara lengkap. Pengembangan Kawasan wisata berkelanjutan berbasis *Tri Hita Karana* yang belakangan menjadi isu menarik dalam pembangunan kepariwisataan di Bali juga telah diulas. Konsep tata nilai dalam perancangan kawasan wisata dengan penerapan konsep *Tri Hita Karana* yaitu terdiri atas 3 (tiga) elemen utama, yaitu 1) *Parahyangan* sebagai inti kawasan yang terdiri dari gugusan pura dan kawasan suci; 2) *Palemahan* sebagai ruang transisi dan ruang interaksi dengan alam lingkungan yang terdiri dari fasilitas penunjang kawasan, dan 3) *Pawongan*, yang adalah desa sebagai ruang aktivitas keseharian dan bermukim bagi masyarakat dan sekaligus melakukan aktivitas ekonomi.

Secara substantif, Buku Pertama tentang Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Wilayah Desa dan Buku Kedua tentang Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan telah mengungkapkan berbagai solusi dalam menangani masalah pembangunan wilayah. Aspek ekonomi, budaya dan lingkungan merupakan suatu kesatuan dalam penyelesaian masalah pembangunan ke depan yang bersifat terpadu dan menyeluruh dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari harapan, namun kami tetap percaya bahwa sekecil apapun tulisan dalam buku ini akan bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih kami sampaikan kepada para dosen Pascasarjana Universitas Bosowa Makasar yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini, juga kepada panitia seminar nasional dan seluruh

sivitas akademika Program Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah bekerja keras untuk menerbitkan karya ilmiah dosen dalam bentuk buku dan juga kepada penerbit yang telah membantu menerbitkan buku ini.

Direktur Pascasarjana
Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Dr. Ir.I Ketut Sumantra, M.P.
NIP: 19611231198903 1 017



“Intelligence plus character,
that is the goal of true education.”

—Martin Luther King Jr.

DAFTAR ISI

BUKU PERTAMA

[1] CHAPTER I:

Integrasi Sektor Pertanian dan Pariwisata Bali Melalui Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat

I Ketut Sumantra

[71]

CHAPTER II: Keberlanjutan Pengembangan Kawasan Agropolitan Belajen di Kabupaten Enrekang

Haeruddin Saleh

[103]

CHAPTER III: Pembangunan Masyarakat Desa Berbasis Kearifan Lokal di Desa Matajang Kabupaten Enrekang

Syamsul Bahri dan Harifuddin Halim

[145]

CHAPTER IV: Pengakuan Masyarakat (Hukum) Adat (Perspektif Otonomi Daerah)

Baso Madiong

[165]

CHAPTER V: Pengembangan Produk Unggulan Rajungan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

Hasanuddin Remmang

[193]

CHAPTER VI: Model Profesionalisme Pengajar pada Era Masyarakat Digital 4.0

I Nengah Sudja dan Ni Kadek Suryani

[217]

CHAPTER VII: *jineng*: Konsep Ketahanan Pangan Keluarga Berbasis Kearifan Lokal

Ni Gusti Agung Gde Eka Martiningsih, Luh Putu Kirana Pratiwi, Dewa Ayu Evi Wahyuni,
I Ketut Sumantra, I Putu Sujana

[227] CHAPTER VIII:

*Potential Flood Disaster Risk in Urban Palangga, Gowa Regency
(Sustainable Development Perspective)*

Syafri dan Arni Putri Awaliyah U.

[251] CHAPTER IX:

Identifikasi Potensi Sumber Daya Desa dalam Pengembangan Desa
Wisata

I Ketut Widnyana, Ni Putu Pandawani, I Putu Karunia

CHAPTER IV

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA MATAJANG KABUPATEN ENREKANG

Syamsul Bahri
Harifuddin Halim
Universitas Bosowa Makassar

Abstrak

Istilah ‘pembangunan’ selalu identik dengan perubahan situasi dari lama ke situasi baru dengan representasi nilai-nilai baru dan meninggalkan nilai-nilai lama. Kondisi ini tercermin pada hampir semua pembangunan yang berlangsung di seluruh pelosok desa di Indonesia. Akibat yang dirasakan melalui pembangunan tersebut adalah kemajuan secara fisik material, tetapi kemunduran secara non materil seperti nilai sosial budaya lokal. Dalam konteks inilah, tulisan ini dibuat dengan maksud menggambarkan urgensi kearifan lokal dalam pembangunan masyarakat desa. Setting sosial tulisan ini adalah Desa Matajang di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Matajang ini memiliki potensi sosial budaya yang besar dan perlu dilestarikan melalui program pembangunan khususnya budaya sehingga dapat menjadi aset lokal. Potensi tersebut berupa Lembaga Adat *Appa Alliri*, dan berbagai ritual. Kedua aset ini merupakan kearifan lokal sekaligus aset sosial budaya yang hidup terus sampai hari ini.

Kata kunci: pembangunan desa, kearifan lokal, lembaga adat.

A. Pendahuluan

Saat ini pembangunan di wilayah pedesaan mengalami kemajuan yang terbilang sangat pesat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pergeseran paradigma pembangunan yang sebelumnya berbentuk sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Bentuk manifestasi dari pergeseran paradigma pembangunan tersebut adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Perubahan paradigma sentralisasi pemerintah ke arah desentralisasi dengan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, dengan landasan konstitusional serta legal yang kuat telah menghasilkan pembaharuan orientasi, konsepsi, regulasi, dan kebijakan pembangunan daerah. Konteks otonomi tersebut mengkondisikan masyarakat desa yang semula tidak memiliki hak otonom untuk mengurus daerahnya, kini mendapatkan hak penuh dalam membangun wilayahnya sendiri. Hal itu berdampak pada kemajuan pembangunan daerah pedesaan. Namun dampak lain yang tercipta adalah terjadinya pergeseran orientasi ekonomi. Orientasi yang semula hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai bentuk subsistensi, kini sudah berkembang menjadi orientasi ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan yang tinggi.

Pada dasarnya proses pembangunan membawa suatu peningkatan kualitas kehidupan manusia. Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, Roupp (dalam Haris, 2014) mengartikan pembangunan sebagai perubahan dari suatu bentuk yang kurang berarti ke suatu bentuk yang lebih berarti. Dalam upaya mencapai tujuan yang terkandung dalam pembangunan tersebut, sumber-sumber daya yang ada dalam masyarakat perlu dimobilisasi sampai pada tingkat yang optimum melalui mekanisme legitimasi yang ada.

Pembangunan sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan pembaharuan yang terencana dan dilaksanakan dalam tempo yang relatif cepat. Berbagai pembaharuan yang telah dilakukan membawa masyarakat pada kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan ekonomi dan kecanggihan sarana komunikasi. Akan tetapi pembangunan yang berdasar pada kecanggihan teknologi dan pertumbuhan ekonomi justru menciptakan gap dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kearifan lokal menjadi alternatif untuk dilirik dan dikembalikan posisinya dalam pembangunan.

Kearifan lokal sangat erat kaitannya dengan masyarakat, karena segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sepatutnya pembangunan dalam masyarakat harus beriringan dengan kearifan lokal yang ada. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa membuka ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik, budaya, serta kearifan lokal masing-masing daerah.

Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Untuk mengetahui kearifan lokal di suatu wilayah maka perlu memahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut. Nilai-nilai kearifan lokal ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh orang tua kepada anak-anaknya, Karena kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang baik dan telah diyakini oleh masyarakat secara turun temurun, maka mengenali unsur-unsur kearifan lokal suatu masyarakat sangat penting dalam proses pemberdayaan dan pembangunan bagi mereka. Seringkali pembangunan dipandang secara keliru, dengan menganggap bahwa pembangunan merupakan perubahan-perubahan nilai, pembangunan gedung-gedung, bahkan transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Namun, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berakar dan mempertimbangkan dengan seksama nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat. Kearifan lokal adalah dasar untuk pengambilan kebijakan pada level

lokal di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Kearifan lokal mencakup berbagai bentuk pengetahuan dan praktik yang dimiliki dan diperoleh manusia sebagai anggota suatu kelompok masyarakat atau komunitas, melalui proses belajar, dan diwariskan secara turun-temurun. Pelbagai pengetahuan dan praktik ini digunakan sebagai pedoman berperilaku dan bertindak dalam kerangka interaksi sosial antarwarga atau kelompok masyarakat, termasuk dalam memodifikasi lingkungan alamnya. Tentu saja, semua pengetahuan dan praktik ini mencakup nilai-nilai luhur dan praktik arif yang menjamin terbangun dan tertatanya kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum, yang lebih optimal. Kearifan lokal, dengan demikian, menyangkut hal luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Koentjaraningrat (1985:1), mengartikan konsep kebudayaan meliputi hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupan, yaitu sebagai keseluruhan total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya, yang dicetuskan dan diperoleh melalui proses belajar. Sebelumnya, kebudayaan hanya dilihat sebagai pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang ditujukan untuk memenuhi hasratnya akan keindahan. Kebudayaan, menurut Koentjaraningrat, dengan pengertian ini hanya mencakup kesenian saja. Padahal, kesenian hanyalah salah satu unsur dari ketujuh unsur universal kebudayaan, yang meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan; sistem dan organisasi kemasyarakatan; sistem pengetahuan; bahasa; kesenian; sistem mata pencaharian hidup; sistem teknologi dan peralatan. Jika dikelompokkan lebih jauh lagi, maka ketujuh unsur universal kebudayaan ini terwujud ke dalam tiga bentuk, yakni: *pertama*, wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dsb. *Kedua*, wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, wujud

kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Jika wujud pertama disebut juga sebagai sistem budaya, maka wujud kedua lazim dikenal sebagai sistem sosial. Wujud ketiga merupakan artefak atau benda-benda hasil karya manusia.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dapat dikatakan bahwa kearifan lokal pada dasarnya merasuk dan terwujud ke dalam tujuh unsur budaya universal di atas, baik dalam bentuk sistem budaya (nilai budaya), sistem sosial (tata kelakuan), maupun melalui benda-benda hasil karya (artefak) suatu kelompok masyarakat di dalam kompleksitas kebudayaannya. Kearifan lokal (*lokal wisdom*) sering juga disebut dengan istilah ‘pengetahuan asli’ (*indigenous knowledge*), ‘pengetahuan lokal’ (*lokal knowledge*).

B. Tinjauan Literatur

1. Budaya dan Kemasyarakatan

Istilah budaya memiliki banyak arti dan telah dirumuskan dalam beberapa definisi. Dua orang ahli antropologi yang berpengaruh, [Alfred Louis Kroeber dan Clyde Kluckhohn dalam bukunya *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions* (1952)], telah mendokumentasikan lebih dari 161 definisi budaya (Cao, 2016). Spencer-Oatey (2012: 2) mencoba mengkompilasi beberapa pengertian budaya. Kompleksnya pengertian budaya dalam perspektif yang beragam, beberapa diantaranya telah disederhanakan oleh beberapa orang peneliti/antropolog, sehingga lebih mudah dipahami oleh banyak orang dari beragam disiplin ilmu. Johnston *et al.* (2000) dalam Stephenson (2008: 129).

Mendefinisikan budaya adalah suatu proses dinamik yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam konstruksi kehidupan kelompok dan hasilnya. Thrift dan Whatmore (2004) dalam Stephenson (2008:129) melihat budaya dalam tiga arti menurut sudut pandang antropologi, yaitu: (1) sebagai keseluruhan cara hidup masyarakat; (2) sebagai suatu cara

fungsional yang menggambarkan identitas kelompok; dan (3) mengacu pada proses sosial tertentu.

Secara sederhana, budaya komunitas berarti kepercayaan, kesukaan, dan perilaku anggota komunitas, sepanjang sesuai dengan mekanisme yang menghubungkan ciri-ciri tersebut dengan yang lainnya. Budaya juga dimaknai untuk menyimpulkan cara suatu kelompok membedakan diri mereka dari kelompok yang lain melalui sejarah, tradisi, nilai, dan kepercayaan (Cao, 2003: 371). Masyarakat hidup berbudaya dan bukan dalam budaya, dengan sumber budaya yang diciptakan melalui praktek-praktek manusia itu sendiri ketimbang dari representasi dunia (Ingold 1994 dalam Stephenson, 2008: 129).

Kebudayaan adalah modal dasar masyarakat untuk mengantisipasi dan mengadaptasi kebutuhan. C. Geertz (1973: 89) menekankan: *“The culture concept..., it denotes an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols: a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men: communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life”*. Kebudayaan adalah pola pengertian atau makna menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis; sistem konsepsi-konsepsi yang diwariskan: dalam bentuk-bentuk simbolis yang dengan cara tersebut manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan. Simbolik yang dimaksud Geertz adalah suatu cara memberi bentuk konseptual objektif terhadap kenyataan sosial dan kejiwaan warganya.

Dapat pula dihubungkan dengan kebudayaan universal yang dikemukakan sistematis oleh Tylor 1881 dan Koentjaraningrat 1985. Konsep para ahli antropologi tersebut membentangkan idea, aktivitas sosial serta materi kebudayaan yang jadi pelapisan lini bagi tujuh unsur kebudayaan yang satu sama lainnya pengaruh-mempengaruhi yaitu: (1) Agama; (2)

Ilmu pengetahuan; (3) Teknologi; (4) Ekonomi; (5) Organisasi sosial; (6) Bahasa dan komunikasi; dan (7) Kesenian (Suparlan,1987).

Menurut Koentjaraningrat (1985), kebudayaan merupakan sebuah sistem yang besar, mempunyai berbagai macam komponen yang berhubungan dengan subsistem kehidupan di masyarakat. Kebudayaan merupakan cikal bakal dari masyarakat. Budaya dibuat oleh masyarakat, tidak ada masyarakat tanpa budaya, yang berarti hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Hakikat pelestarian budaya sendiri bukanlah sekadar memelihara sesuatu hal dari kepunahan dan atau menjadikannya awet semata-mata. Pelestarian budaya selain mempunyai muatan ideologis yaitu sebagai gerakan untuk mengukuhkan kebudayaan, sejarah dan identitas (Lewis, 1983), juga sebagai penumbuh kepedulian masyarakat untuk mendorong munculnya rasa memiliki masa lalu yang sama di antara anggota komunitas.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan memang tidak mudah. Aktualisasi budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat pada kenyataannya masih belum berjalan baik. Nilai-nilai budaya yang bersumber pada kearifan lokal dan kebudayaan suku-suku bangsa dengan masuknya unsur-unsur budaya asing dalam interaksi kebudayaan lintas bangsa, menyebabkan masyarakat cenderung abai terhadap nilai-nilai budaya lokal.

2. Pengertian Kearifan Lokal

Menurut Karo, kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Kemudian menurut Sibarani (2012) dalam Suaib (2017) juga menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kebijakan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan

masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam suatu ekosistem masyarakat, dapat dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi lainnya yang sekaligus membentuk dan menuntun pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap lingkungan.

Kearifan lokal merupakan modal utama masyarakat dalam membangun dirinya tanpa merusak tatanan sosial yang adaptif dengan lingkungan alam sekitarnya. Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam.

Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup yang dapat diamati melalui sikap dan perlakuan mereka sehari-hari.

Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kebudayaan yang ada, sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan kedalam proses atau kaidah perencanaan wilayah atau kawasan yang ada, seperti yang terdapat pada masyarakat adat yang ditetapkan untuk aktivitas tertentu.

Kemudian ciri-ciri kearifan lokal menurut Oding (2002) dalam Suaib (2017) meliputi: (a) Semangat kemandirian dan keswadayaan, (b) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan, (c) Menjamin daya hidup dan keberlanjutan, (d) Mendorong teknologi tepat guna yang efektif dari segi biaya dan memberikan kesempatan untuk memahami dan memfasilitasi perancangan pendekatan program yang sesuai.

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesis atau perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal produk budaya masa lalu yang runtut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas.

3. Fungsi Kearifan Lokal

Adapun fungsi kearifan lokal adalah: (a) kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. (b) kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia. (c) berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. (d) berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sara dan pantangan.

Selain itu fungsi kearifan lokal Sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar, mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli dan memberikan arah pada perkembangan budaya.

4. Kearifan Lokal dan Pembangunan

Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Jadi, untuk melaksanakan pembangunan di suatu daerah, hendaknya pemerintah mengenal lebih dulu seperti apakah pola pikir dan apa saja yang ada pada daerah yang menjadi sasaran pembangunan tersebut. Adalah sangat membuang tenaga dan

biaya jika membuat tempat wisata tanpa memberi pembinaan kepada masyarakat setempat bahwa tempat tersebut adalah “ikon” atau sumber pendapatan yang mampu menyejahterakan rakyat di daerah itu. Atau lebih sederhananya pembangunan akan menjadi sia-sia jika pemerintah tidak mengenal masyarakat atau potensi yang tepat untuk pembangunan di daerah tersebut (Theresia dkk, 2015: 72).

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terdapat lima isu strategis yang terkait dengan kearifan lokal, menurut Saharuddin dalam (Theresia dkk, 2015: 72-73) yaitu: (a) Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. (b) Komitmen global terhadap pembangunan sosial masyarakat adat. (c) Pelestarian lingkungan yang menghindari keterdesakan masyarakat asli dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. (d) Meniadakan marginalisasi masyarakat asli dalam pembangunan nasional. (e) Memperkuat nilai-nilai kearifan masyarakat setempat dengan mengintegrasikan dalam desain kebijakan dan program pembangunan.

Dalam setiap pembangunan, mengenali potensi daerah yang hendak dibangun sangat penting dilakukan agar pembangunan tersebut tidak sia-sia dari segi material ataupun imaterial. Kearifan lokal yang diimbangi dengan potensi lokal sangat mendukung proses pembangunan masyarakat berbasis kearifan lokal di Desa Matajang.

Kearifan lokal atau *lokal wisdom* merupakan pengetahuan masyarakat yang muncul dari periode yang panjang berevolusi antara masyarakat dan lingkungannya. Kearifan lokal oleh sebagian masyarakat dijadikan dasar dalam pengelolaan lingkungan yang berprinsip kepada pembangunan yang berkelanjutan. Kemajuan teknologi dalam era globalisasi telah berpengaruh terhadap penggunaan dan eksistensi dari kearifan lokal, karena nilai-nilai atau adat istiadat tersebut dianggap telah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman yang serba modern. Di sisi lain, prinsip dan konsep kearifan lokal dapat tetap hidup berdampingan dengan era globalisasi ini, dapat

dijadikan referensi dari pembangunan yang berkelanjutan setelah tentunya melalui pemberdayaan nilai-nilai dan pengetahuan lokal tersebut. Pemberdayaan kearifan lokal dapat dilakukan melalui berbagai macam aspek seperti: peningkatan nilai-nilai lokal melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi maju; penguatan kelembagaan masyarakat pengelola sumber daya alam, penegakan pelaksanaan melalui penetapan regulasi (hukum positif) dan lain sebagainya.

Kebijakan pemerintah tersebut harus terus diperbaiki termasuk menggali nilai-nilai dan pengaturan lokal atau kearifan lokal untuk diterapkan dalam aktifitas masyarakat setempat. Kearifan lokal merupakan kebijakan manusia dan komunitas dengan bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional untuk mengelola semua sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Dukungan dari sebuah masyarakat lokal dalam bentuk kearifan lokal sangatlah penting karena mereka memiliki motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk melindungi kehidupannya. Masyarakat adat memiliki nilai dan motivasi yang kuat dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam habitat mereka. Masyarakat memiliki hukum lokal berupa hukum adat untuk ditegakkan. Masyarakat lokal memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistemnya. Komitmen dan sinergitas dari seluruh kekuatan sosial masyarakat sangat dibutuhkan untuk proses pembangunan yang selaras dan bermanfaat luas bagi seluruh masyarakat dengan melibatkan nilai-nilai kearifan lokal (Subejo dan Supriyanto, 2004).

C. Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Sumber daya Alam

Kearifan lokal menciptakan harmonisasi antara alam dengan masyarakat. Kearifan lokal tumbuh dari karakter dan

budaya masyarakat yang sudah mengakar dan secara turun temurun telah dijalani sebagai jalan hidup penyatuan kultur sosial dengan alam di sekitarnya (I Nyoman, 2008). Bagi masyarakat adat menempatkan persoalan-persoalan alam sebagai bentuk interaksi dalam merespon segala perilaku manusia (masyarakat) yang memperlakukannya. Manusia diciptakan Tuhan sebagai pemimpin dimuka bumi, untuk mengelola alam dengan segala isinya dengan baik dan sempurna sehingga bermanfaat untuk manusia secara terus menerus. Proses pengelolaan alam oleh manusia perlu dilihat apakah perlakuannya dalam konteks ketaatan atau kemungkaran, sehingga alam akan menyeimbangkan dengan kekuatannya, karena alam memiliki sifat ketaatan yang absolut terhadap Tuhan-Nya (*sunnatullah*). Pemanfaatan alam dalam pandangan ini tidak hanya dari segi pengetahuan tentang alam raya sebagai suatu sistem, tetapi juga fenomena sosial yang muncul dari interaksi antarmanusia dengan berbagai masalah yang dihadapi sebagai ayat-ayat kauniah. Perilaku manusia dapat diamati, diperhatikan, dipahami dan dihayati melahirkan kesadaran dan keyakinan akan kebenaran dalam kaitannya dengan nilai-nilai normatif (hukum), bukan saja harus ditaati sebagai suatu kewajiban tetapi juga kesadaran dan keyakinan akan kemurahan atau kemurkaan alam yang selalu mengarahkan manusia kearah keselamatan dan kesejahteraan atau sebaliknya kepada kehancuran/bencana. Kearifan lokal mengandung pengertian sebagai bentuk hubungan yang serasi antara manusia dengan alam ataupun sebaliknya, masyarakat lokal memahami kearifan secara totalitas dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ketaatan terhadap hukum adat (ulayat) yang pada dasarnya adalah warisan dari generasi sebelumnya harus dimanfaatkan secara baik dengan memperhatikan dampak bagi generasi yang akan datang. Sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal tetapi bukan untuk dihabiskan karena di dalamnya ada hak generasi selanjutnya. Oleh karena itu, penting sekali

agar sumber daya alam dikelola secara optimal dan berkelanjutan dalam proses jangka panjang sebagai modal dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

D. Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Matajang

Sumber daya sosial budaya dilebur kembali menjadi sumber daya sosial dan sumber daya budaya. Sumber daya sosial terdiri dari Andulang dan kearifan lokal, kemudian sumber daya budaya terdiri dari budaya lokal dan tradisi. Ciri khas sumber daya sosial budaya yang ada di Desa Matajang antara lain:

1. Andulang

Andulang merupakan sebuah tempat pelaksanaan ritual di Matajang yang terkait erat dengan karakter sakral suatu tempat. Andulang adalah keyakinan abstrak yang dimiliki oleh tempat, yang secara material mempengaruhi individu yang melewatinya.

2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat dan menjadi acuan yang mengatur perilaku sehari-hari masyarakat setempat sehingga dapat pula menjadi faktor yang menentukan status sosial seseorang dalam konteks hidup bermasyarakat.

Pada masyarakat Matajang, kearifan lokal terwujud dalam semua aspek kehidupan mereka. Salah satu contohnya adalah adanya lembaga adat Appa Aliri yang memiliki tugas untuk melindungi masyarakat agar tetap dalam kehidupan yang harmonis. Dalam lembaga adat Appa Aliri terdapat tugas seorang Sanro yang melindungi masyarakat dari gangguan makhluk halus.

3. Sumber daya lokal

Masyarakat Matajang sangat menjaga kelestarian hutan. Oleh karenanya, hampir semua aktifitas keseharian mereka

memiliki relasi dengan hutan seperti ritual. Selain itu, mereka tidak secara serampangan melakukan pembabatan hutan melainkan harus ada izin dari lembaga adat *Appa Alliri*.

4. Sistem pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan adalah tindakan melakukan penilaian untuk menjatuhkan pilihan. Pada masyarakat Matajang, musyawarah mufakat dilakukan oleh lembaga adat *Appa Alliri* bersama masyarakat dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan di masjid setiap hari jumat.

5. Tradisi dan *Event*

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat (Sztompka, 2010). *Event* adalah kegiatan/upaya mendatangkan pengunjung/ wisatawan baik domestik maupun mancanegara dikemas dalam sebuah acara. Tradisi dan *event* merupakan dua unsur kebudayaan yang berbeda, namun dalam paper ini, tradisi di Matajang banyak jenisnya dalam bentuk ritual. Ritual yang terbesar dinamakan ‘Macceraq Manurung’ yang penyelenggaraannya setiap dua tahun.

6. Mitos

Mitos adalah cerita dari masa lampau dan sudah terlanjur dipercaya oleh masyarakat dan bahkan disucikan. Mitos hadir dalam masyarakat lantaran ketidakmampuan akal manusia dalam merasionalkan sebuah realitas yang ada. Mitos tentang *Appa Alliri* sebagai titisan Tuhan tetap hidup sampai saat ini di masyarakat Matajang.

7. Kepercayaan

Kepercayaan dalam konteks sosial budaya menurut Kluckhohn (1953 dalam Geertz 1973) adalah terkait spiritualitas manusia terhadap kekuatan yang lebih tinggi dari yang dapat diolah oleh nalar manusia. Masyarakat Matajang

adalah penganut agama Islam, tetapi masih bersifat sinkretis dengan kepercayaan lokal.

8. Sistem Mata Pencaharian

Dalam suatu budaya tertentu, sistem mata pencaharian menjadi salah satu kegiatan yang dilestarikan. Dalam masyarakat Matajang, bertani (secara tradisional) dianggap masyarakat sebagai mata pencaharian turun temurun yang harus dilestarikan. Pertanian mereka juga terbebas dari unsur-unsur modern seperti penggunaan pupuk kimia dan traktor. Hal ini disebabkan oleh kuatnya peranan Lembaga Adat *Appa Alliri* dalam kehidupan masyarakat Matajang.

E. Urgensi Lembaga Adat *Appa Alliri* Dalam Pembangunan

Appa Alliri merupakan lembaga adat di masyarakat Matajang yang beranggotakan empat orang. Keempat orang tersebut mewakili masing-masing bidang kehidupan masyarakat Matajang, yaitu: *Tomatoa* sebagai ketua memberikan izin pelaksanaan ritual, *Imang* yang mengatur tata cara pelaksanaan ritual dan perilaku masyarakat, *Dulung* sebagai penanggungjawab mata pencaharian terutama terkait pertanian, *Sanro* penanggungjawab kesehatan masyarakat baik kesehatan lahir maupun gangguan kesehatan dari jin (Bahri dan Halim, 2019).

F. Ritual dan *Appa Alliri* Sebagai Penggerak Pembangunan

Masyarakat Matajang memiliki asset ritual yang cukup variatif, mulai dari yang bersifat individu, keluarga, maupun publik (masyarakat). Tetapi, ritual yang paling besar adalah *Macceraq Manurung* yang dilaksanakan setiap dua tahun, kemudian ritual *Rambu Soloq*, ritual *Rambu Tuka'*, ritual *Macceraq Tanah*, ritual *Andulung* dan beberapa ritual lainnya (Bahri, 2017).

Dalam pelaksanaan ritual-ritual tersebut, semuanya dilangsungkan atas perkenan lembaga adat *Appa Alliri*

sekaligus dipimpin oleh mereka. Hal tersebut sangat penting karena semua ritual tersebut mengandung semua unsur yang ada dalam komposisi lembaga adat sehingga setiap anggota lembaga adat memiliki perannya masing-masing dalam ritual.

Dalam keyakinan masyarakat Matajang, keharmonisan hidup mereka sehingga selaras dengan alam, manusia, dan Tuhan harus dimulai dengan mengikuti aturan dari *Appa Alliri* yang anggotanya merupakan titisan atau representasi dari Tuhan. Oleh karena itu, posisi lembaga adat memiliki kekuatan yang besar di masyarakat Matajang.

Dalam berbagai kegiatan pembangunan di Matajang, pemerintah desa selalu menggandeng Appa Alliri. Bagi Appa Alliri, pembangunan masyarakat oleh pemerintah harus didukung sehingga mereka memerintahkan masyarakat untuk terlibat di dalamnya dan masyarakat Matajang mematuhi hal tersebut.

G. Simpulan

Lembaga adat *Appa Alliri* sebagai bentuk kearifan lokal di masyarakat Matajang memiliki kekuatan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan. *Appa Alliri* secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap pembangunan melalui penyelenggaraan ritual budaya setempat. Setiap ritual budaya yang diadakan selalu dihadiri oleh masyarakat Matajang. Ini berarti bahwa pelestarian budaya lokal secara tidak langsung juga memiliki substansi pembangunan.

Daftar Pustaka

- Aprilia, Theresia, Krisnha S. Andini, 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Bahri, Syamsul. 2017. *Modal Sosial dan Appa Alliri*. Makassar: Sah Media.
- Bahri, Syamsul, dan Harifuddin Halim. 2019. *Lembaga Adat Dan Partisipasi Sosial*. Makassar: Inteligencia Publishing.

- Cao, Lan. 2016. *Culture In Law And Development: Nurturing Positive Change*. Oxford: Oxford University Press.
- Fahrudin, Adi. 2000. *Pemberdayaan Partisipasi Dan Penguatan Masyarakat*, Bandung: Humaniora.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation Of Culture*. Penerbit: Basic Books.
- Haris, Andi. 2014. Diseminasi Proses Pengelolaan Pembangunan Desa. *Jupiter* Vol. Xiii No.1(2014), Hal 9-16
- Nurjaya, I Nyoman. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Penerbit: Prestasi Pustaka.
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Lewis, Oscar. 1983. “Kebudayaan Kemiskinan”; *Dalam Kemiskinan Di Perkotaan* Di Edit Oleh Parsudi Suparlan, Jakarta – Sinar Harapan – Yayasan Obor.
- Spencer-Oatey, H. (2012) What Is Culture? A Compilation Of Quotations. Globalpad Core Concepts. Available At Globalpad Open House [\[https://Warwick.Ac.Uk/Fac/Soc/Al/Globalpad/Openhouse/Interculturalskills/Global Pad - What Is Culture.Pdf\]](https://Warwick.Ac.Uk/Fac/Soc/Al/Globalpad/Openhouse/Interculturalskills/Global Pad - What Is Culture.Pdf)
- Stephenson, J. (2008). *The Cultural Values Model: An Integrated Approach To Values In Landscapes*. Proceedings.
- Suaib, Hermanto. 2017. *Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Denpasar: AnImage.
- Subejo, Dan Supriyanto. 2004, Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, *Bahan Kuliah: Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*, Universitas Gajah Press.

Suparlan, Parsudi, 1987, *Masyarakat: Struktur Sosial Dalam Manusia Indonesia Individu Keluarga Dan Masyarakat*, A.Widjaya: Akademi Pressindo

Sztompka, Piotr. 2010. *Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama.

Tylor, Edward Burnett (1881). *Anthropology An Introduction To The Study Of Man And Civilization* London: Macmillan And Co.

